



Prosiding

Seminar Nasional

**“Pemberdayaan Masyarakat Menuju
Kemandirian Desa”**

Bandarlampung, 12 November 2016

Penyelenggara:



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

PROSIDING

Seminar Nasional Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung dengan tema:

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA“

PEMBICARA:

1. Drs. Yudha Setiawan, M.M. (Kepala BPMPD Provinsi Lampung)
2. Drs. Edi Firnandi, M.Si. (Kepala BPMD Kabupaten Lampung Selatan)
3. Drs. Abdul Syani, M.IP. (Universitas Lampung)
4. Drs. Witoro (NGO)
5. Dewi Cahyani Puspitasari, S.Sos., M.A. (Universitas Gadjah Mada)
6. Dr. Anggraeni Primawati, M.Si. (Universitas Nasional)
7. Dr. Erna Rochana, M.Si. (Universitas Lampung)

REVIEWER:

1. Dr. Sindung Haryanto, M.Si
2. Drs. Abdul Syani, M.IP.
3. Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
4. Drs. I Gede Sidemen, M.Si
5. Dr. Benjamin, M.Si.

EDITOR:

1. Drs. Susetyo, M.Si.
2. Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
3. Damar Wibisono, S.Sos. M.A.

SAMBUTAN KETUA PANITIA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat karuniannya kita dapat mengikuti seminar ini dalam keadaan sehat walafiat.

Seminar yang bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat menuju kemandirian desa” ini diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Kami mengundang kurang lebih 100 orang untuk hadir dalam seminar ini yang mewakili dari berbagai unsur antara lain: politisi, akademisi, praktisi (Kepala Desa, pendamping desa), Dinas/instansi Pemerintah, LSM, Pers, mahasiswa dan juga alumni Jurusan Sosiologi Fisip Unila.

Seminar ini merupakan forum untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami secara khusus mengundang kolega kami (para akademisi) di seluruh nusantara untuk berpartisipasi dalam seminar ini baik sebagai peserta, nara sumber maupun pemakalah. Alhamdulillah niat baik kami mendapat sambutan luar biasa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung dan Bapak Drs. Yudha Setiawan, M.M. sebagai keynote speaker. Ucapan yang sama kami tujukan kepada Bapak/ibu nara sumber dan para peserta. Seminar ini terselenggara dengan baik, berkat kerja keras teman-teman panitia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia.

Tak ada gading yang tak retak. Seminar ini dalam pelaksanaannya tentu terdapat kekurangannya, untuk itu atas nama panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terakhir, kami ucapkan selamat berseminar semoga sekecil apapun upaya kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara ini, amin.

Akhirul kalam Bitaufik wal hidayah, Assalamu’alaikum warohmatullohiwabarokatuh.

Bandarlampung, 12 November 2016

Dr. Sindung Haryanto, M.Si
Ketua Panitia

DAFTAR ISI

STRATEGI DAN PENDEKATAN NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA Abdul Syani	1-12
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INKLUSIF: MELALUI PERSPEKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DESA MANDUIN KECAMATANMUARA HARUS KABUPATEN TABALONG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Anggraeni Primawati, Yoyok Hendarso	13-26
WIRUSAHA SOSIAL MUDA DESA: PERAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Dewi Cahyani Puspitasari	27-37
PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT Susetyo, Benjamin	38-50
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DESA DI KOTA SUNGAI PENUH Yolla Ramadani	51-57
KENDALA DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UJUNGJAYA MENUJU DESA MANDIRI Yanti Setianti, Iriana Bakti, Aat Ruchiat Nugraha	58-64
STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KELOMPOK WANITA TANI USAHA PENGOLAHAN PRODUK PANGAN BERBASIS SINGKONG Henita Astuti, Joko Ari Wibowo	65-73
PENYULUHAN HAK AZASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA ANAK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH DESA TARAHAH KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yuni Ratnasari, Dwi Wahyu Handayani	74-83
TAHAP PRAKONFLIK DAN KONFRONTASI PADA KONFLIK ANTAR WARGA DESA AGOM DENGAN DESA BALINURAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Benjamin	84-96

PROSES DAN UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN “MENCAPAI KESEPAKATAN UNTUK MEMBANGUN PERDAMAIAN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN HAK BERIBADAH” Ikram	97-101
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ALAM (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARYA MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ECENG GONDOK DI KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT) Ilham Gemiharto	102-108
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG WISATA UNTUK PROMOSI MUSEUM ADAT SAI BATIN SANGGI UNGGAK BANDAR NEGERI SEMOUNG BERBASISKAN TEKNOLOGI Bartoven vivit Nurdin, Damayanti, Dadang Karya Bakti, Suprihatin Ali...	109-118
EKONOMI KREATIF BUDIDAYA CACING TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BANYUAJUH, KAMAL, BANGKALAN Sugeng Purwoko, Abdur Rohman, Ahmad Mughni	119-123
TANAH UNTUK RAKYAT (SUATU PELAYANAN DIAKONI GEREJA MELALUI YABIMA INDONESIA DALAM BENTUK ADVOKASI ALIH FUNGSI TANAH MUKIM DAN GARAP UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI) Ikram	124-130

STRATEGI DAN PENDEKATAN NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA

Abdul Syani

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Email: abdul.syani@gmail.com

Abstrak

Keberagaman etnis dan budaya masyarakat desa di Lampung seringkali rentan terhadap perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya. Untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban hidup masyarakat diperlukan perlindungan sosial budaya sebagai penopang ketahanan masyarakat berupa nilai kearifan lokal Lampung, khususnya pandangan hidup *Piil Pesenggiri* dan adat *Hippun*. Untuk mewujudkan harapan itu, maka perlu menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama kegiatan pembangunan desa.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal dan mencerminkan cara hidup masyarakat setempat. Nilai-nilai kearifan lokal itu berlaku dan dihormati sebagai sumber pengetahuan dan kebijakan dalam kegiatan pembangunan dan pemecahan masalah melalui adat *hippun*. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai kearifan lokal dipercaya dan diyakini dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Dengan demikian pandangan hidup *Piil Pesenggiri* dan adat *Hippun* dapat menjadi kekuatan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Oleh karena itu dalam penyebarluasan praktik-praktik pembangunan desa secara formal sebaiknya mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman dalam merangkai ragam kepentingan pertumbuhan aspirasi masyarakat secara harmonis, tanpa ada pihak yang dikorbankan.

Kata kunci: Kearifan Lokal *piil pesenggiri* dan adat *hippun*, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pendahuluan

Masyarakat adat Lampung memiliki kearifan lokal berupa *falsafah hidup fil pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* mengandung pandangan hidup yang diyakini sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai moral (kebaikan) bagi kehidupan masyarakat, sehingga kemudian mentradisi dan melekat kuat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. *Piil Pesenggiri* yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi berbagai masalah kehidupan masyarakat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka waktu yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dengan bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Piil pesenggiri didukung unsur-unsurnya, yaitu: *Bejuluk-beadok*, *Nemui-nyimah*, *Nengah-nyappur*, dan *Sakai-samabayan*. *Bejuluk-beadok* artinya mempunyai gelar adat; *Nemui-nyimah*, artinya ramah dan terbuka; *Nengah-nyappur* artinya sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama, dan tidak membedakan suku, agama,

tingkatan, asal usul dan golongan; sedangkan sakai-sambayan berarti suka mengamalkan kegiatan tolong menolong dan gotong royong.

Dengan prinsip Piil pesenggiri kehidupan sosial masyarakat Lampung *Sang Bumi Ruwa Jurai* dapat menjadi sebuah lingkungan sosial dengan komunitas yang hidup rukun, berdampingan dan bekerjasama. Setiap komunitas menjaga sikap toleransi, meningkatkan dan bersatu dalam rasa persaudaraan. Pemahaman Sang Bumi Ruwa Jurai sendiri merupakan simbol kesatuan hidup dua akar budaya yang berbeda dari masyarakat Lampung Asli, yaitu Masyarakat adat Lampung *Sebatin dan Pepadun*. Dengan hadirnya etnis dan budaya luar, diharapkan dapat berdampingan atau bergabung terhadap kedua jurai budaya pribumi tersebut.

Untuk menghargai nilai-nilai luhur kearifan lokal, maka segenap warga harus mampu menggali, memelihara, menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur Piil Pesenggiri mengandung nilai-nilai budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa sejajar dengan orang lain (Abdul Syani , 2013).

Nilai-nilai kearifan lokal piil pesenggiri itu tumbuh dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat Lampung pada umumnya, baik dalam penataan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis internal, multi etnis eksternal (terdiri penduduk asli dan pendatang), maupun dalam upaya pemeliharaan lingkungan sosial dengan komunitas yang hidup rukun, berdampingan dan bekerjasama. Akan tetapi dalam kenyataan perkembangannya kekuatan nilai-nilai kearifan lokal justeru belum mampu membangun kehidupan yang harmonis bahkan nyaris terancam. Banyak komunitas yang belum mampu menjaga sikap toleransi, meningkatkan dan bersatu dalam rasa persaudaraan. Pemahaman Sang Bumi Ruwa Jurai sendiri banyak yang tidak memahami simbol kesatuan hidup dua akar budaya yang berbeda dari masyarakat Lampung Asli, yaitu Masyarakat adat Lampung *Sebatin dan Pepadun*. Begitu juga dengan hadirnya etnis dan budaya luar, ternyata belum dapat (bahkan tidak) berdampingan atau bergabung terhadap kedua jurai budaya pribumi yang telah ada, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan/konflik.

Dari segi kenyataan pengamalannya, banyak pihak yang menganggap piil pesenggiri sekedar tradisi yang tidak mempunyai potensi untuk membangun kesejahteraan ekonomi. Ada yang menganggap piil pesenggiri sebagai kehormatan untuk diri sendiri dan mengagungkan orang yang dianggap lebih unggul. Sikap ini cenderung mendorong perilaku terbuka untuk mengorbankan orang lain untuk membahagiakan diri sendiri dan golongannya. Pihak generasi muda justeru keliru dalam menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai piil pesenggiri. Harga diri dan kehormatan dinilai sebagai kesombongan dan penuh dengan sifat dendam dan tidak mau mengalah; bukan diterapkan sebagai unsur semangat kemandirian, tidak mampu menerima tantangan, tidak percaya diri, mudah putus asa, tidak mampu memikul tanggung jawab, dan merasa lebih tinggi dari orang lain.

Pada sisi lain, masyarakat adat Lampung memiliki bentuk kearifan lokal yang disebut HIPPUN. HIPPUN diartikan sebagai kegiatan kumpul, mengumpulkan, menghimpun (pendapat), atau menjaring aspirasi warga. BUHIPPUN artinya melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai kesamaan pendapat atau kata sepakat (supaya mencapai kesepakatan, kesepakatan) terhadap rencana, kegiatan, peristiwa, atau cara pemecahan masalah tertentu. BUHIPPUN merupakan anonim dari suatu upaya untuk mencapai atau mencari kesepakatan; maksudnya usaha menghimpun pendapat khalayak agar suatu rencana dan keputusan yang diambil bersama lebih aspiratif dan mewakili semua lapisan sosial. Secara ringkas, BUHIPPUN dapat diartikan sebagai kegiatan musyawarah untuk mencapai mupakat. Istilah ini umumnya digunakan masyarakat adat

Saibatin lima marga Kalianda dan sekitar utk menyebut kegiatan musyawarah (Abdul Syani, 2013).

Dalam dialek bahasa yang berbeda, hippun adat disebut juga "*Peppung adat*", yaitu kegiatan musyawarah. Istilah peppung umumnya digunakan masyarakat adat Pepadun Abung siwo mego, Megow Pak Tulang Bawang, dan sebagian Pubian dalam menyebut kegiatan musyawarah. Peppung adat secara umum dapat artinya kegiatan berkumpul bersama antara penyimbang adat untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah adat, revitalisasi hukum-hukum adat atau untuk mengembangkan rasionalisasi adat istiadat demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.

Relatif sama dengan pengertian istilah buhippun, *Peppung* berarti melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, kesepahaman atau kesamaan pendapat terhadap rencana, kegiatan, atau langkah-langkah tertentu untuk kepentingan bersama. Peppung pada dasarnya menunjuk pada suatu usaha menghimpun aspirasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam mencari keputusan bersama tentang solusi atas suatu perkara atau strategi progres tentang rencana tertentu. Secara umum, peppung dipahami sebagai aktivitas musyawarah untuk mencapai kesamaan pendapat.

Warisan budaya dan nilai-nilai tradisional itu mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan agar nilai-nilai kearifan lokal tetap relevan dengan kemajuan jaman. Diharapkan para tokoh / penyimbang adat lebih arif dalam bertahan terhadap derasnya tekanan budaya asing, mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya asing yang relevan ke dalam budaya lokal, mampu mengendalikan dan memberi arah pada pengayaan budaya lokal.

Dalam kenyataannya banyak pihak yang belum mampu memahami makna, fungsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal adat hippun cenderung diartikan sebagai kegiatan kumpul atau sekedar mengumpulkan teman-teman, dan bukan upaya menghimpun (pendapat), atau menjaring aspirasi warga untuk program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Bhippun tidak diartikan sebagai kegiatan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama untuk membangun kesejahteraan, melainkan untuk mengambil manfaat pribadi dari keputusan musyawarah itu. Acara buhippun diartikan melakukan kegiatan musyawarah untuk adu pendapat dengan berusaha menjatuhkan pihak lain, siapa yang kuat dialah pemenangnya dan orang lain harus tunduk dengan keputusannya. Hippun dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari dukungan, bukan untuk mencapai kesamaan pendapat atau kata sepakat (supaya mencapai kesepakatan, kesepahaman), baik dalam upaya penguatan strategi dan pendekatan terhadap upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maupun usaha penanganan masalah perselisihan antar warga.

Konsekuensi dari kenyataan itu, buhippun seringkali menimbulkan masalah baru, seringkali menimbulkan ketegangan antar peserta hippun, lantaran masing-masing egois dan sukar mengakui pendapat peserta yang lain. Akibatnya usaha menghimpun pendapat khalayak agar suatu rencana dan keputusan yang diambil bersama cenderung mengalami kegagalan, dan tidak mampu menjaring aspirasi masyarakat pada umumnya.

Kegagalan yang seringkali dialami dalam mencari kesepakatan untuk penguatan strategi dan pendekatan nilai kearifan lokal adat hippun tersebut karena adanya hambatan kultur itu sendiri, yaitu:

1. Erosi nilai budaya, ketimpangan sosial dan pelanggaran norma sosial dan hukum,
2. Gelaja kemiskinan, prustasi, apatisme, kenakalan remaja, pelacuran, pengangguran dan kejahatan,
3. Ketidakmampuan menyerap dan menguasai kemajuan teknologi,
4. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk menciptakan teknologi yang berakar dari budaya sendiri,

5. Anomie, yaitu suatu keadaan dimana nilai lama sudah ditinggalkan tapi nilai-nilai baru belum tumbuh secara kuat,
6. Tumbuh pola kehidupan yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok,
7. Pembagian kerja yang heterogen, berbelit-belit dan fungsi yang beraneka ragam
8. Kompleksitas kepentingan berangsur meninggalkan prinsip norma hukum adat,
9. Agen pembangunan tidak mapan dalam beradaftasi dan kurang memperhitungkan institusi tradisional kehidupan masyarakat adat. Akibatnya program pembangunan ekonomi kerakyatan sering kurang mendapat dukungan masyarakat,
10. Dilema, disatu pihak masyarakat adat terkait pada hukum, sementara dipihak lain mereka dihadapkan dengan cara kerja yang rumit dan asing, kendatipun mereka mempunyai keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Abdulsyani, seminar interaktif Hukum dan politik pertanahan dengan makalah: Hak ulayat dan strategi pembedayaan masyarakat adat, diselenggarakan di Graha parahita marcopolo hotel Bandar Lampung).

Searah dengan hambatan kultural itu, kearifan lokal adat hippun sebagai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional itu dalam kenyataannya dianggap tidak relevan lagi dengan kemajuan dan kondisi saat ini. Upaya untuk pelestariannya makin rendah, bahkan upaya pengembangannya pun dianggap sebagai kegiatan pemborosan. Kepeloporan para tokoh / penyimbang adat juga makin sulit diharapkan; jika ada pun kearifan lokal hippun cenderung dimanfaatkan untuk menghimpun dukungan politik. Kenyataan lain kearifan lokal adat hippun jesteru larut dalam derasnya tekanan budaya asing, upaya memberi arah pada pengayaan budaya lokal tidak tercapai, bahkan tidak mampu mengendalikan fungsi nilai kearifan hippun itu untuk kepentingan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Suatu realitas perkembangan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipungkiri adalah gejala tantangan pluralistik etnis dan tekanan ekonomi kian mengedepan. Hal ini akhirnya berpengaruh pada terciptanya stratifikasi dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat adat harus dapat menempatkan peran individu ke dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan memberikan tanggungjawab kemandirian kepada masyarakat berdasarkan pengalaman sendiri dapat mendorong kearah terciptanya hasil kerja dan hasil guna yang tinggi. Masyarakat diarahkan pada kehidupan empiris dengan perjuangan dan kerja keras sesuai dengan tuntunan nilai-nilai luhur budaya daerah yang tertuang dalam pandangan hidupnya.

Atas dasar kenyataan itu, maka dalam penulisan makalah ini perlu pengkajian ilmiah, khususnya tentang strategi dan pendekatan nilai kearifan lokal Lampung dalam pemeliharaan keterteaman dan ketertiban Masyarakat desa.

Merujuk pada paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini, yaitu: Bagaimana trategi dan pendekatan nilai kearifan lokal Lampung piil pesenggiri dan hippun dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa?

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjelaskan trategi dan pendekatan nilai kearifan lokal Lampung piil pesenggiri dan hippun dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini adalah studi pustaka, dengan pertimbangan bahwa metode ini dianggap efektif digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam aplikasi metode pustaka ini digunakan untuk menjaring data berupa materi, data, dan informasi yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, buletin, jurnal imiah edisi cetak maupun

edisi online, artikel ilmiah yang bersumber dari internet, kertas kerja, hasil penelitian, makalah bahan seminar yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam makalah ini.

Data yang dianggap relevan tersebut adalah data tentang makna dan fungsi nilai-nilai kearifan lokal Lampung, khususnya piil pesenggiri dan unsur-unsurnya. Juga masalah-masalah terkini yang berkaitan dengan penerapan unsur-unsur piil pesenggiri dan adat hippun pemekonan yang bersumber dari studi pustaka. Kecuali itu dikumpulkan juga data dan informasi yang berkaitan dengan upaya masyarakat desa dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum

Pembahasan

Secara umum kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran, rasa dan hasil karya manusia sebagai wujud dari interaksi adat istiadat masyarakat. Ada juga yang mengartikan kebudayaan secara luas, yaitu total dan pikiran, karya dan hasil karya manusia yang dicetuskan sesudah adanya suatu proses interaksi. Konsep ini tentu sangat luas karena meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Kata kebudayaan merupakan pengertian yang meliputi unsur hubungan/interaksi antara satu atau lebih manusia dalam suatu kelompok masyarakat, yang dalam pola dan tingkah laku interaksinya didasarkan pada unsur kebiasaan dalam masyarakat yang berlaku, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai interaksi sosial yang berlandaskan pada lingkungannya. Sedangkan kata budaya, yaitu merupakan pengembangan dari kata majemuk budi-daya, yang daya dan budi atau kekuatan dan akal.

Dengan pendekatan kebudayaannya yang struktural dan fungsional, van Peursen menyajikan suatu model kebudayaan yang bertahap tiga (mitologis, ontologis, dan fungsional), tapi yang serentak bersifat progresif dan integral antara ketiganya. Peursen juga menandakan bahwa kebudayaan itu terus menerus nampak sebagai suatu strategi (atau rencana) yang harus dibuat guna membebaskan manusia dari penjara yang dibuat manusia sendiri melalui kreativitas etis dan pembaharuan yang invensif (van Peursen, 1989).

Dalam perspektif Peursen, pembangunan sebuah bangsa yang bercirikan fluralisme kebudayaan dengan pola pendekatan fungsional kebudayaan akan menunjang kebudayaan-kebudayaan lokal untuk secara sadar "*berada*" (eksis) dan berperan (partisipatif) dalam proses kristalisasi kebudayaan nasional dan pembangunan bangsa. Menurut Peursen mengutip pendapat filsuf Jerman Immanuel Kant, bahwa ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan merupakan semacam sekolah di mana manusia dapat terus menerus belajar.

Pengertian kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara etimologis, kearifan (*wisdom*) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Filosofis kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

Ada 5 (lima) saran strategis pengembangan relasi budaya dan agama sebagaimana dikemukakan oleh Philipus Tule, berdasarkan hasil kajiannya terhadap kebudayaan masyarakat Flores NTT. (sesuai juga dengan sistem penguatan kekerabatan dalam budaya masyarakat Lampung), yaitu:

- 1) Pelanggungan, pengembangan dan perayaan budaya lokal (daerah) yang unik dan terancam punah;
- 2) Prioritas investasi demi proteksi, pengembangan dan promosi aset budaya lokal yang memiliki nilai positif dan progresif;
- 3) Penciptaan kesempatan bagi individu dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam aktivitas perayaan budaya;
- 4) Promosi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lewat sektor pariwisata berbasis kebudayaan lokal dan pelbagai industri kreatif; dan
- 5) Penghargaan dan pendanaan oleh pemerintah untuk pelbagai kegiatan penelitian dan publikasi akademis oleh pakar dan lembaga penelitian lokal (daerah) serta usaha pelestarian lewat museum budaya daerah.

Menurut Robert Sibarani (2013), kearifan lokal itu adalah nilai dan norma budaya yang berlaku dalam menata kehidupan masyarakat. Nilai dan norma yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Kearifan lokal adalah pengetahuan asli (*indigineous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi nilai dan norma budaya untuk kedamaian dan kesejahteraan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembangunan masyarakat. <http://www.museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasis-kearifan.html>

Sedangkan Philipus Tule (2008), menyatakan bahwa bertolak dari pengalaman global, mencoba menilai pelbagai kebijakan dan realitas pembangunan bangsa Indonesia yang berbasis budaya. Tanpa pretensi melabelkan budaya Indonesia (dan aneka budaya lokal) sebagai yang putih dan hitam, yang progresif atau yang statis, diyakini bahwa terdapat sejumlah besar nilai-nilai budaya lokal yang positif dan progresif. Salah satu nilai budaya yang positif adalah kekerabatan yang berbasis rumah sebagai wahana toleransi dan penunjang pembangunan. Dalam studi antropologi tentang “rumah asal” telah menjadi fokus penting, di samping studi mengenai “silsilah leluhur asal” (*geneology*) dan “tempat asal” (*topogeny*). Rumah dalam konteks ini tidak saja dipahami sebagai suatu konstruksi (bangunan) fisik dan tempat diam dari sekelompok manusia. Rumah juga memiliki makna simbolis yang mengejawantahkan leluhur sekaligus merupakan terminologi untuk unit sosial. Sebagai konsekuensi dari masyarakat berbasis rumah itu, suatu sistem kekerabatan dibangun dan dihayati penuh keselarasan dan keseimbangan (harmoni) antara anggotanya: Muslim, Krinten dan penganut agama asli. Lebih jauh dari itu, kekerabatan bukan saja dihayati secara terbatas pada asas hubungan darah (*consanguinal*) ataupun hubungan perkawinan. Kekerabatan juga dikonstruksi oleh masyarakat adat menjadi lebih luas jangkauannya lewat “proses inkorporasi para pendatang” (entah orang Jawa, Cina dan Arab) yang bisa mengubah status “orang luar” jadi “orang dalam” dengan seperangkat kewajiban sosial yang harus dipeluhinya selama mereka masih menghuni kawasan tanah ulayat dari etnis itu.

Nilai kearifan lokal Lampung yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi sosial budaya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, yaitu “*Falsafah hidup Piil Pesenggiri dan adat hippun*”. Menurut kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung memiliki sifat malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri yang terhormat. Ke-dua nilai kearifan lokal ulun Lampung ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Piil Pesenggiri

Piil Pesenggiri mempunyai nilai-nilai budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010: <http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>).

Piil pesenggiri juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik serta martabat secara pribadi maupun secara kelompok senantiasa dipertahankan.

Secara ringkas pengamalan dari prinsip-prinsip Piil Pesenggiri itu dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Juluk-Adek

Secara etimologis Juluk-adek dapat diartikan gelar adat, yang terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Penobatan juluk-adek dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmian.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

1.2 Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda *temui* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja *nemui* yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. *Nyimah* berasal dari kata benda "*simah*", kemudian menjadi kata kerja "*nyimah*" yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah *nemui-nyimah* diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. *Nemui-nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui-nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Bentuk konkrit *nemui nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain. Secara ringkas *nemui-nyimah* dapat diartikan ramah dan terbuka, yaitu suka saling mengunjungi untuk bersilaturahmi dan ramah dalam menerima tamu.

1.3 Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan *nyappur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *nyappur* yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. *Nengah-nyappur* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan

dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. Secara ringkas nemui-nyimah dapat diartikan suka bergaul, suka dan aktif berbaur dengan kegiatan masyarakat (tidak individualis).

1.4 Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Sakai sembayan senantiasa menjaga sikap kebersamaan, termasuk di dalamnya sikap saling tolong menolong, terutama terhadap kaum yang lemah dalam pengertian menyeluruh, baik lahir maupun batin. Secara ringkas sakai-sambayan dapat diartikan suka saling tolong menolong terhadap anggota masyarakat dan suka bergotong royong untuk tujuan kepentingan bersama

Sifat-sifat ulun Lampung itu seringkali diungkapkan dalam adi-adi (pantun), yaitu:

1. Tandani hulun Lampung, wat piil-pusangiri
(*tandanya orang Lampung, memiliki kehormatan*)
2. Mulia hina sehitung, wat malu rega diri
(*mulia atau hina diperhitungkan, ada rasa malu dan harga diri*)

3. Juluk-adok ram pegung, nemui-nyimah muwari
(*gelar adat dipegang teguh, ramah tamah dan bersaudara*)
4. Nengah-nyampur mak ngungkung, sakai-sambaian gawi
(*bergaul tidak terbatas, saling mambantu dan bergotong royong*)

2. Adat HIPPUN

Adat hippun adalah suatu kebiasaan bermusyawarah dalam setiap perencanaan, kegiatan ataupun dalam penyelesaian masalah yg berlaku bagi masyarakat adat. Bagi warga yang tidak mendukung, menghindari atau menghambat acara hippun, seringkali ia disebut "*mak ngidok piil*" (tidak punya malu). Adat hippun secara ideal dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Seluruh tahapan yang dilalui memiliki makna tersendiri, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa sembarangan. Adapun tahapan prosesi hippun secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. *Hippun wakhi pelambanan* (musyawarah antar anggota keluarga, keluarga besar, kerabat dekat)
2. *Hippun suku* (musyawarah antara kepala-kepala suku yang mewakili pihak-pihak keluarga-keluarga yang melaksanakan upacara adat muwakhi).
3. Hippun tiyuh/pekon (antar penyimbang tiyuh dari masing-masing pihak calon angkon muakhi)
4. *Hippun Marga* (musyawarah antar kepala/perwatin marga)
5. *Hippun Lamban Balak* (persiapan penentuan gelar adat calon wakhi, undangan *Tuha Khaja* dan perangkat pemerintahan adatnya, penyusunan naskah *cawa tetangguh*/pidato/wejangan/pesan tuha khaja tentang hak dan kewajiban penyimbang wakhi, dan penyusunan janji sumpah atau katam)
6. Persiapan *pakaian adat* masing penyimbang/tuha khaja, keluarga, dan pihak-pihak calon angkon muakhi (sigokh/siger/mahkota adat, baju/beskap/jas, sarung tupal, disesuaikan), payung adat, jejalan handak, kebung, lamat/kursi/dan lain-lain.
7. Persiapan *lokasi* prosesi pelaksanaan hippun
8. Pembacaan *susunan acara* oleh Penglaku tuha (petugas/panitia penyelenggara adat tetap yang senior)
9. Penetapan dan pembuatan *keputusan* hippun
10. Acara *petutup* dengan doa (petugas).

Dari tahapan tersebut dapat diketahui bahwa prosesi *hippun* (pemekon) yang dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Lampung sangat penting, terutama untuk memelihara silaturahmi antar warga, menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu acara hippun perlu dilestarikan, meskipun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman dan rasional. Adat hippun merupakan wujud semangat kearifan lokal masyarakat Lampung dalam upaya mencapai kesepakatan bersama. Dengan hippun diperoleh kesepakatan yang mengikat keberbersama warga atas usaha pemeliharaan ketenteraman dan keamanan masyarakat tersebut. Artinya, nilai kearifan lokal hippun ini dapat dijadikan sebagai strategi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat Desa. Kecuali itu adat hippun dapat dijadikan strategi dan pendekatan ampuh dalam penyelesaian perselisihan/konflik.

Dalam tahapan prosesi adat hippun tersebut, seperti hippun penyelesaian perselisihan warga, lazim juga disertai dengan perjanjian formal adat lokal. Perjanjian ini memiliki daya ikat yang kuat untuk memelihara perdamaian antar pihak, sehingga jauh dari ancaman konflik. Perjanjian dalam adat hippun biasanya berupa pernyataan perjanjian atas nama Allah SWT untuk selalu saling menjaga kesepakatan, saling percaya, selalu menjaga ketenteraman dan ketertiban warga. Apabila terjadi pelanggaran, maka sanksinya adalah cidera dan tercela secara sosial budaya, dikucilkan dari kegiatan adat dengan batas waktu tertentu, dan membayar denda adat.

Daya ikat dari perjanjian dalam adat hippun itu sangat kuat, melekat pada setiap diri dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu upaya pemeliharaan dan implementasi nilai-nilai adat hippun memiliki potensi strategis dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Di samping dapat digunakan sebagai strategi menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat secara arif dan bijaksana. Melalui pendekatan kearifan lokal budaya, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bermoral, tanpa menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

Pendekatan sosial secara interaktif dapat dilakukan penyederhanaan kondisi sosial, yaitu merujuk pada spesifikasi budaya dlm menentukan prioritas pengembangan potensi masyarakat. Sasarannya adalah revitalisasi kekuatan partisipasi masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melibatkan masyarakat dlm setiap perencanaan & pengambilan keputusan program pembangunan sebagai wujud demokrasi sosial,
- 2) program yang dilegitimasi dapat menjamin prioritas hak-hak masyarakat, dan pemerataan (kesempatan usaha),
- 3) memberdayakan independensi peranserta masyarakat,
- 4) membangun kemitraan dengan pemerintah, kaum intelektual, dan lembaga-lembaga terkait,
- 5) mengangkat dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong dan aspirasi masyarakat, agar tupoksi dpt menyentuh kepentingan masyarakat, setidaknya dapat mencerminkan cara hidup yang terarah dengan contoh-contoh perilaku dan perlakuan yang nyata dan simpatik. Kalau ingin memberantas minuman keras jangan demon terhadap botol minuman, melarang merokok tapi kalau merokok katanya MACHO (Abdulsyani, 2010. makalah seminar budaya tentang pendekatan sosial budaya).

Dalam rangka penanganan perselisihan yang selama ini mengalami kebuntuan akibat dari berbagai campurtangan dan pola pendekatan yang tidak relevan dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Pada akhirnya seringkali menimbulkan masalah baru, yaitu konflik laten, kecemasan berkepanjangan, dan keragaman faktor pemicu konflik terbuka yang sulit diprediksi. Ada beberapa alasan pentingnya memelihara dan implementasi kearifan lokal adat hippun tersebut, yaitu:

1. Nilai-nilai kearifan lokal hippun merupakan tradisi /pedoman yg dianggap ampuh/efektif dalam membuat keputusan tentang perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
2. Nilai-nilai kearifan lokal hippun merupakan tradisi /pedoman yg dianggap ampuh/efektif dalam membuat keputusan tentang penyelesaian konflik, yaitu adat kemuarian (kemuakhian/mewarei adat/angke(o)n muakhi)
3. Mekanisme resolusi konflik dg tradisi adat hippun kemuarian tertuang dlm bentuk upacara perdamaian pihak2 yg berkonflik, bermusyawarah secara kekeluargaan yg difasilitasi oleh lembaga peradilan adat atau formal menurut hukum pemerintahan adat (akan lebih baik formal secara kenegaraan)
4. Landasan adat hippun adalah falsafah hidup Piil Pesenggiri khususnya elemen nemui nyimah, negah nyappur, sakai sambayan, maka masyarakat adat Lampung termasuk kelompok masyarakat yg dinamis dg berpegang pd norma kesusilaan dan sosial yg mengedepankan musyawarah utk mufakat.
5. Acara hippun ditetapkan atas dasar hasil musyawarah (pepung/hippun) dan diputuskan berdasarkan hukum adat yg memiliki daya ikat sangat kuat dan bersanksi jika dilanggar.
6. Jika telah ditetapkan keputusan bersama tentang rencana tertentu, khususnya upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat setempat, maka konsekuensinya siapapun, dari manapun, seperti apapun bentuk, rupa asal usul, mereka tetap saling menghormati, menghargai, toleransi, terbuka, saling membela,

melindungi, dan tolong menolong sebagaimana prinsip hidup piil pesengiri. Keputusan hippun disadari oleh berbagai pihak yang terlibat secara arif, baik emosional maupun rasional.

7. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hippun, senantiasa akan terikat kuat dengan ikrar/janji) yg telah disepakati bersama sebagai keputusan sakral. Oleh karena itu masyarakat adat Lampung pada umumnya menjadikan tradisi lokal adat hippun sebagai pedoman strategis, khususnya dalam upaya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penyelesaian konflik.

Sesuai dengan falsafah pemersatu Lampung yang mengajarkan bahwa: "*mabulat khupa iyuk, malukhus khupa sepuk*"; bulat seperti bambu peniup api, lurus seperti jalannya panah, Artinya sikap mental seiya-sekata (persatuan dan kesatuan) antarwarga sepatutnya memang dimiliki demi mencukupi kepentingan bersama suatu lingkungan, komunitas atau negara.

Atas dasar pembahasan di atas, maka nilai kearifan lokal prinsip "*piil pesengiri*" dan "*adat hippun*" dapat direkomendasikan sebagai strategi dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penyelesaian konflik. Perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat adat tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial budaya. Pendekatan ini menyentuh kesadaran hati, empati, terbuka, pengampunan, rekonsiliasi, kebenaran, keadilan restorative (pemulihan hubungan yang sudah retak), dan kerjasama, melalui keteladanan. Praktik fungsi-fungsi sosial ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai membentuk karakter kebajikan pribadi yang memiliki kekuatan mengikat. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki wawasan keinginan untuk membangun perdamaian, searah dengan kesepakatan bersama untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat dilakukan melalui upaya melaksanakan peningkatan dan pengembangan seluruh potensi dan sumber daya manusia sebagai potensi untuk menunjang sistem pertahanan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan secara terpadu, yaitu mencakup:

- 1) Upaya penguatan dan memberikan peranan kepada organisasi kemasyarakatan sebagai potensi lokal maupun nasional dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.
- 2) Upaya membangun jaringan informasi pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya guna mendorong kemampuan masyarakat untuk berdialog mengatasi konflik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan bela negara.
- 3) Upaya penguatan masyarakat dan kelembagaannya untuk mampu membangun dan melaksanakan fungsi mediasi yang mampu menghubungkan visi kebangsaan dan bela negar serta aspirasi masyarakat.
- 4) Upaya penguatan masyarakat dan kelembagaannya untuk mendorong proses kaderisasi kepemimpinan masyarakat yang di samping memiliki kemampuan manajerial, juga memiliki visi kebangsaan dan bela negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua nilai kearifan lokal Lampung yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi dan pendekatan sosial budaya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, yaitu Falsafah hidup Piil Pesengiri dan adat hippun.

Kearifan lokal piil pesengiri menyangkut prinsip harga diri, sikap dan perilaku yg dpt menjaga dan menegakkan nama baik serta martabat (kehormatan) pribadi dan kelompok. Konsekuensi orang yg memiliki karakteristik mengagungkan harga diri dan kehormatan pribadi dan kelompoknya adalah harus memiliki semangat yg tinggi dlm

memelihara dan memperjuangkannya dengan kerja keras, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, dan mampu merubah kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Sebaliknya menghindari perbuatan memalukan, hina, arogansi, amoral dan perbuatan kejahatan lainnya, krn perbuatan ini merupakan gambaran rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang. Dalam karakteristik itu terdapat prinsip *malu* jika tidak mampu memelihara kehormatannya, malu jika tidak berhasil mengejar berprestasi.

Secara umum nilai kearifan lokal "*piil pesenggiri dan hippun*" dapat direkomendasikan sebagai strategi dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penyelesaian konflik. Perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat adat tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial budaya. Pendekatan ini menyentuh kesadaran hati, empati, erbuca, pengampunan, rekonsiliasi, kebenaran, keadilan restorative (pemulihan hubungan yang sudah retak), dan kerjasama, melalui keteladanan. Praktik fungsi-fungsi sosial ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai membentuk karakter kebajikan pribadi yang memiliki kekuatan mengikat. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki wawasan keinginan untuk membangun perdamaian, searah dengan kesepakatan bersama untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Langkah-langkah untuk membangun kearifan lokal, diharapkan para pemuka adat, masyarakat, dan tokoh agama secara simultan melakukan sosialisasi ke setiap kelompok warga masyarakat adat untuk memberikan pencerahan dan menciptakan kerukunan bersama. Kecuali itu agar masyarakat tidak terseret pada pemikiran sempit yang memanfaatkan nilai kearifan lokal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru kearifan lokal dalam memelihara dan membangun kerukunan masyarakat meski dalam suasana multikultural dan multietnis.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2013. Makalah: Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat (*di sampaikan pada seminar/lokakarya pada kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung, tanggal 24 Januari 2013*).
- , 2010. (<http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>).
- , 2013. Makalah: Multikulturalisme Lampung: Penghargaan Atas Kearifan Lokal Untuk Menciptakan Stabilitas Daerah (*Disampaikan pada kegiatan Orientasi Kewaspadaan Nasional bagi Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Elemen masyarakat di Provinsi Lampung oleh Badan Kesbangpol dengan tema "Meningkatkan Kewaspadaan nasional melalui deteksi dini, cegah dini, dan kewaspadaan dini demi tercapainya suawana kondusif di Provinsi Lampung, di Hotel Andalas Permai Jl.S.Parman, Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2013*).
- , Seminar interaktif Hukum dan politik pertanahan dengan makalah: *Hak ulayat dan strategi pembedayaan masyarakat adat*, diselenggarakan di Graha parahita marcopolo hotel Bandar Lampung).
- , 2010. *makalah seminar budaya tentang pendekatan sosial budaya*.
- Robert Sibarani, 2013. (<http://www.museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasis-kearifan.html>)
- Philipus Tule, SVD., 2008. *Strategi Kebudayaan Lokal Keo, Flores NTT: Wahana Harmonisasi Masyarakat melalui Pembangunan dan Kesejahteraan*. Editor: Kenedi Nurhan, Penerbit: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Bekerjasama dengan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI).
- Van Peursen, 1989. *Strategi Kebudayaan*. Penerbit: Kanisus, edisi kedua. Yogyakarta.